



# Demokrasi, Budaya dan Penguatan Masyarakat Lokal

Bowo Sugiarto (ed.)

Bowo Sugiarto (ed.)

**DEMOKRASI, BUDAYA DAN PENGUATAN  
MASYARAKAT LOKAL**



*Demokrasi, Budaya, dan Penguatan Masyarakat Lokal*

Copyright : © Andi Ali Akbar, *et al.*

Editor: Bowo Sugiarto

Editor Bahasa: Imam Suhardi

Reviewer Konten: Warjio

Penata Letak: rl. lendo

Perancang Sampul: Aulia Rahmat SM

Cetakan 2020

xii+108; 14 x 20 cm

ISBN: 978-602-0787-67-1

Diterbitkan oleh:

**RELASI INTI MEDIA** (Anggota IKAPI)

Jl. Veteran, Gg. Manunggal RT/RW. 20/05 No. 638 C

Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta

Telp: 0274-4286584

Email: [redaksi@relasibuku.com](mailto:redaksi@relasibuku.com)

## Prakata

---

**B**eragamnya arena kontestasi politik dan isu-isu yang digunakan oleh para aktor politik memungkinkan kita untuk melihat bagaimana kekuasaan merasuk ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Buku bunga rampai ini memiliki sejumlah kata kunci yang menjadi perantara untuk memahami bagaimana politik dan kekuasaan bekerja dalam beragam arena dan wajah. Kata kunci pertama adalah demokrasi. Alih-alih mengkaji demokrasi secara normatif, sejumlah tulisan dalam buku ini ingin melihat bagaimana aktor politik menyiasati ruang-ruang ambigu untuk memenangkan kontestasi politik. Ruang-ruang ambigu di sini mencakup aspek kelembagaan demokrasi yang mengatur politik uang, korupsi sampai keagamaan. Kata kunci kedua adalah budaya. Signifikansi budaya dalam studi politik sudah menjadi perhatian banyak ahli. Buku ini juga mengajak pembaca untuk menimbang pengaruh budaya dalam penguatan demokrasi dan kelembagaan politik di tingkat lokal. Terakhir, kata kunci kedua dari buku ini adalah penguatan masyarakat lokal. Penguatan masyarakat lokal di sini mencakup baik analisis terhadap konflik politik lokal sampai pemberdayaan masyarakat desa. Meskipun ketiga kata kunci itu bisa

dilihat berdiri sendiri, buku ini mengajak pembaca untuk menemukan benang merah dari beragamnya arena kontestasi politik dan isu-isu yang digunakan oleh para aktor politik. Terakhir, akan disinggung pula saran terkait metode penelitian yang bisa digunakan untuk menindaklanjuti tulisan dalam buku ini.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari sejumlah dosen Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Buku ini tidak akan menjadi kenyataan tanpa bantuan dari banyak pihak. Kami mengucapkan terima kasih kepada FISIP dan Jurusan Ilmu Politik Unsoed yang menyediakan sumber daya dan dukungan dalam berbagai bentuk untuk mewujudkan buku ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Warjio (FISIP Universitas Sumatera Utara) sebagai reviewer konten dan Imam Suhardi sebagai editor bahasa. Semua kekurangan tulisan dan buku ini tetap menjadi tanggung jawab kami, para penulisnya. Semoga kekurangan tersebut dapat kami perbaiki jika ada edisi revisi yang mungkin akan terbit di masa mendatang.

## Daftar Isi

Prakata .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
Bab 1. Dinamika Praktik Money Politics Pada Pemilu 2014 Di Kabupaten Banyumas .....	1
Bab 2. Konsep Dan Tipologi Politisasi Agama Dalam Pemilihan Umum.....	51
Bab 3. Peta Konflik Tanah Perkebunan Dan Kepentingan Aktor Yang Terlibat Dalam Upaya Resolusi .....	79
Bab 4. Menggali Nilai Lokal Dalam Budaya Jawa Pinggiran Untuk Mendukung Demokratisasi .....	107
Bab 5. Negara, Masyarakat Lokal, Dan Pasar: Kendala Pengembangan Desa Mandiri Energi Berbasis <i>Calophyllum Inophyllum</i> Di Jawa.....	129
Bab 6. Pengembangan Posdaya Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat Desa .....	149
Bab 7. Korupsi Dalam Tinjauan Governability.....	167
Bab 8. Mencari dan Memetakan Masalah Penelitian.....	185
Kontributor.....	221

## Bab 4

# **MENGGALI NILAI LOKAL DALAM BUDAYA JAWA PINGGIRAN UNTUK Mendukung DEMOKRATISASI**

Sofa Marwah

### **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara dengan budaya lokal yang sangat beragam. Keberagaman tersebut tercermin dari perbedaan etnik, agama, ras, bahasa, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di berbagai wilayah Indonesia. Seiring perkembangan masa, nilai-nilai budaya juga bersinggungan dengan praktik politik. Konsepsi tentang budaya politik mengacu pada pengertian bahwa sikap politik dan pola perilaku diasumsikan memengaruhi hubungan warga dengan sistem politik. Konsepsi budaya politik dari Gabriel Almond dan Sidney Verba dalam *The Civic Culture* sejauh ini masih menjadi studi dalam sub-disiplin ilmu politik yang sangat kuat (Almond & Verba, 2015 ; baca juga Hooghe, 2013). Kedua ilmuwan politik tersebut menekankan orientasi terhadap politik sangat penting untuk memelihara sistem politik demokrasi. *Civic culture* mencerminkan partisipasi politik warga yang tidak merusak otoritas pemerintah, karena warga negara menyadari bahwa keberlanjutan sistem politik membutuhkan kepatuhan dan tanggung jawab mereka.

Sesuai dengan penjelasan teoretisasinya, budaya politik merujuk pada sikap warga negara, namun dalam praktiknya juga mencakup pola-pola perilaku yang berkaitan dengan sikap tersebut. Dalam konteks demikian, studi tentang budaya politik di Indonesia sudah banyak mendapatkan perhatian dari para ilmuwan politik. Beberapa di antaranya adalah Clifford Geertz (2017) yang menggolongkan budaya politik masyarakat Jawa menjadi santri, abangan, priyayi. Berikutnya adalah Harould Crouch (1979) yang menyebut bahwa budaya politik Indonesia bersifat neopatrimonialistik. Dalam pandangannya, tatanan negara Indonesia mempunyai atribut modern dan rasionalistik, contohnya keberadaan birokrasi. Namun kekuasaan yang dipraktikkan Orde Baru dari pusat hingga daerah tampak sangat personalistik. Selanjutnya, studi dari James Scott (1972) menyebutkan bahwa budaya politik Indonesia memiliki hubungan patron klien. Pola tersebut menunjukkan relasi dari dua kelompok yang tersegregasi, baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan, sehingga patron berkedudukan superior dan klien memiliki posisi yang inferior. Adapun studi Claire Holt, Benedict Anderson, dan James Siegel (1972) menyebutkan bahwa sangat sulit untuk mengidentifikasi budaya politik di Indonesia dikarenakan atributnya kabur. Satu hal yang menjadi titik tolak adalah pola budaya yang dominan dan berasal dari kelompok etnis yang dominan pula, yaitu etnis Jawa. Dalam hal ini, etnis Jawa sangat mewarnai sikap, perilaku, dan orientasi politik elit di Indonesia.

Studi yang lebih baru tentang budaya politik di Indonesia dilakukan oleh William Liddle & Saiful Mujani (2000) yang menyebut budaya politik Indonesia sedang dalam transformasi dari budaya



tradisional menuju modern. Studi yang menggali kebudayaan dan kekuasaan, paling banyak dipotret dari kebudayaan yang dominan, yaitu Jawa. Studi lainnya dilakukan Siti Zuhro et al. (2009) yang menggali nilai-nilai dalam budaya lokal dan relevansinya dengan demokrasi, yaitu di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Bali. Dalam studi tersebut ditunjukkan adanya nilai-nilai dalam budaya lokal yang mendukung demokratisasi atau, sebaliknya, nilai-nilai budaya lokal yang tidak sejalan dengan proses demokratisasi.

Tulisan ini dimaksudkan untuk melengkapi studi tentang penelusuran nilai-nilai budaya lokal yang mendukung demokrasi di Indonesia, dengan memilih budaya Jawa pinggiran. Setidaknya, kebudayaan Jawa pinggiran relatif tidak banyak mendapatkan perhatian dari para ahli karena lebih fokus pada pusat kekuasaan Jawa, yaitu Yogyakarta dan Solo. Studi ini memilih kebudayaan Jawa pinggiran yaitu budaya Bagelen di Jawa Tengah. Pengertian wilayah Jawa pinggiran mengacu Koentjaraningrat (1984) yang membagi variasi kebudayaan Jawa. Budaya Bagelen merupakan wilayah pinggiran yang terletak di wilayah *mancanegara*, jauh dari pusat kebudayaan Jawa, yaitu Kasunanan Solo dan Kasultanan Yogyakarta (sebagai wilayah *negaragung*).

Dalam peta variasi regional kebudayaan Jawa, wilayah budaya Bagelen secara administratif mencakup Kabupaten Purworejo dan Kebumen. Berdasarkan peta variasi kebudayaan Jawa tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan Bagelen setidaknya mencakup Kabupaten Purworejo dan Kebumen (lihat Gambar 1 di bawah).



**Gambar 2.** Variasi Regional Kebudayaan Jawa  
(Sumber : Koentjaraningrat, 1984)

Karena sifat budaya yang mengalami akulturasi dan tidak terbatas secara administratif, maka sulit untuk memastikan budaya Bagelen hanya hidup di masyarakat yang tinggal di daerah itu. Meski demikian, adalah mungkin untuk mengatakan bahwa pusat kebudayaan Bagelen berada di Kabupaten Purworejo. Hal tersebut setidaknya tercermin dari keberadaan situs Nyai Bagelen di wilayah Purworejo yang merupakan salah satu cagar budaya yang dilindungi. Dalam komplek petilasan Nyai Bagelen terdapat sejumlah makam kuno dan peninggalan sejarah Buddha yang berupa stupa-stupa berjumlah sembilan buah dengan ukuran setiap stupa yang berbeda-beda. Dia dinyatakan sebagai peninggalan sejarah purbakala menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Selain petilasan Nyai Bagelen, terdapat daerah dengan nama Desa Bagelen yang masuk wilayah Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo. Kesimpulan bahwa Kabupaten Purworejo merupakan

pusat kebudayaan Bagelen juga didasarkan atas keberadaan prasasti Kayu Ara Hiwang. Prasasti yang ditulis dalam huruf dan bahasa Jawa kuno itu menginformasikan keterangan 5 Oktober 901 M; tanggal yang kemudian menjadi dasar bagi penetapan hari jadi Kabupaten Purworejo. Pada tahun 2019 hari jadi Kabupaten Purworejo diubah menjadi 27 Februari 1831. Hal ihwal perubahan hari jadi Kabupaten Purworejo disebutkan dalam karya Peter Carey (2017). Sementara, informasi seputar asal mula dan sejarah masyarakat Bagelen secara lengkap dipaparkan dalam buku *Sejarah Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo* (tanpa tahun).

Keberadaan Bagelen sebagai budaya Jawa pinggiran, menjadikannya hampir tidak memiliki bukti tertulis yang menyatakan kebesaran nama Bagelen di masa lalu (Sudiby, 2019). Berkaitan dengan hal tersebut, Radix Penadi (1988) yang menulis buku *Bagelen dan Mataram Kuno* mencoba menelusuri kaitan wilayah tersebut dengan Kerajaan Majapahit, Kerajaan Demak, dan Kerajaan Mataram. Dijelaskan oleh Penadi bahwa Bagelen menjadi salah satu tempat pembangunan tempat ibadah sejak masa berkembangnya Hindu dan kemudian Islam. Selain ditandai dengan keberadaan tokoh penyebaran agama, di wilayah tersebut juga banyak ditemukan ragam peninggalan candi, benda-benda kuno, dan kemudian masjid-masjid bersejarah.

Selanjutnya, tulisan ini akan mengidentifikasi nilai-nilai budaya lokal dalam budaya Bagelen sebagai budaya pinggiran. Dalam konteks politik lokal, tulisan ini mengkaitkannya dengan proses demokratisasi. Untuk itu, tulisan ini dibagi menjadi beberapa bagian besar, yaitu bagian yang mengkaji keragaman unsur dalam budaya Bagelen yang secara harmonis dapat berpadu; selanjutnya

bagian yang menggali nilai-nilai budaya lokal yang mendukung proses politik dapat berlangsung secara tertib dan damai. Terakhir, tulisan ini melengkapi dengan penutup yang menggarisbawahi pentingnya menggali nilai-nilai budaya lokal yang mendukung proses demokratisasi.

### **Paduan Keragaman dan Keharmonisan Unsur dalam Budaya Bagelen**

Kebudayaan Bagelen tidak dapat dipisahkan dari dua tradisi kebudayaan di sebelah kanan dan kirinya. Dalam hal ini, budaya Bagelen bersanding dengan pusat kebudayaan Jawa di sebelah timur dan budaya Banyumas di sebelah baratnya. Gejala perbedaan budaya antara lain dapat diidentifikasi dengan bahasa yang digunakan. Tatahan bahasa Jawa memiliki strata yang kuat untuk membedakan seseorang berbicara dengan siapa dan dari kalangan apa. Adapun bahasa Banyumas, dikenal lebih terbuka dan tidak mengenal strata sosial penggunaannya. Bahkan bahasa Banyumas bersifat egaliter digunakan antar individu, istri terhadap suami, adik terhadap kakak, dan seterusnya. Adapun budaya Bagelen terletak di antara keduanya sehingga menunjukkan wilayah budaya peralihan. Hal tersebut tampak pula pada penggunaan bahasa sehari-hari yang digunakan.

Sebagai wilayah yang berada di luar pusat kekuasaan atau *negaragung*, budaya politik Bagelen mengandung nilai-nilai egaliter dibanding daerah pusat kekuasaan Jawa. Nilai-nilai kesetaraan yang ditunjukkan dengan lapisan sosial masyarakat yang tidak terlalu

kuat mengarah pada hubungan antar kelas sosial yang lebih saling menghargai. Salah satunya tercermin dari perbedaan bahasa antar kelas sosial yang tidak terlalu ketat. Seperti diketahui bahwa bahasa Jawa memiliki tiga tingkatan bahasa, yaitu *ngoko*, *kromo madya*, *kromo inggil*. Masing-masing tingkatan bahasa menunjukkan kelas sosial yang menggunakan bahasa tersebut. Bahasa *ngoko* untuk kalangan bawah, bahasa *kromo madya* untuk kelas menengah, dan *kromo inggil* untuk kalangan atas. Sartono Kartodiharjo (1992) menyebutkan bahwa rakyat biasa menggunakan bahasa halus untuk ditujukan kepada kalangan atas sebagai pemegang kuasa, sebaliknya kalangan atas tersebut menggunakan bahasa kasar kepada kalangan bawah.

Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah budaya Bagelen, penggunaan bahasa Jawa tidak lagi mencerminkan kelasnya. Justru yang dominan adalah bahasa pergaulan sehari-hari yang bebas dan tidak menunjukkan tingkatan kelas penggunaannya. Kondisi demikian tercermin dari penggunaan bahasa sehari-hari dan dalam tata cara pergaulan masyarakat di wilayah budaya Bagelen, misalnya masyarakat di kawasan pantai Pesisir Selatan Jawa. Sebagian wilayah Bagelen yang terdiri dari pantai juga mencirikan masyarakat yang lebih bebas dan kurang mencerminkan tatanan *angghah-ungguh* dalam sudut pandang Jawa-sentris. Jadi, bahasa Bagelen adalah bahasa peralihan dari bahasa Jawa pusat (Solo-Yogyakarta) dengan bahasa Banyumas. Logat atau dialek yang muncul dalam bahasa Bagelen merupakan campuran Jawa dan Banyumas, dengan pembagian di sebelah barat Bagelen barat lebih bernuansa dialek Jawa, sedangkan bagian Bagelen barat lebih menonjol dialek Banyumas dengan batas daerah yang disebut

Kutawinangun (Sugeng Priyadi, 2004). Perpaduan nilai budaya Bagelen dari unsur-unsur yang membentuknya merefleksikan tatanan yang lebih bebas dan kurang terstratifikasi secara sosial. Hal demikian menampakkan keharmonisan karena keragaman unsur budaya yang mendukungnya.

Selain itu, unsur-unsur di wilayah Bagelen juga terlihat dari perpaduan unsur Islam, Kristen, dan tradisionalisme. Seperti banyak wilayah lain di Pulau Jawa, perkembangan Islam di wilayah Bagelen juga bersentuhan dengan adat istiadat lokal. Dalam hal ini, terdapat tiga situs utama yang menunjukkan awal perkembangan Islam di masa lalu, yaitu petilasan Sunan Geseng, Masjid Sunan Geseng, dan Masjid Santren (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2008). Dalam perkembangan Islam, terdapat potret akulturasi Islam dengan budaya lokal Bagelen melalui upacara tradisional, kesenian khas, cerita rakyat, dan sebagainya. Sebagian masyarakatnya mengenal praktik Islam kejawaan, yaitu Islam yang masih mengadopsi tradisi sebelum Islam masuk dan berkembang di tanah Jawa. Demikian pula bangunan masjid peninggalan masa Kerajaan Mataram yaitu Masjid Sunan Geseng dan Masjid Santren, juga menggunakan arsitek tradisional Jawa.

Pada masa perang Jawa tahun 1825—1830, kehidupan masyarakat Bagelen ditandai dengan berlangsungnya perang Diponegoro. Perang Diponegoro sendiri berlangsung dengan diwarnai nilai-nilai spritualisme Jawa dan Islam. Studi Peter Carey (2016) menunjukkan seorang perempuan sufi yang menjadi pengikut tarikat Satariyyah dikenal sebagai pengajar agama Islam sekaligus praktik spritual Jawa, adalah yaitu Ratu Ageng, permaisuri Sultan Hamengku Buwono I. Ratu Ageng adalah nenek buyut Pangeran

Diponegoro yang mengasuh dan mengajarkan Diponegoro tentang ajaran Islam dan spiritualisme Jawa. Pada masa perang tersebut, wilayah Bagelen menjadi daerah rebutan elit politik yang penting.

Dalam peta kekuasaan Mataram, setelah perjanjian Giyanti tahun 1755, wilayah Bagelen berada dalam peta politik yang rumit, karena sebagian wilayahnya masuk Kasunanan Surakarta dan sebagian lainnya masuk wilayah Yogyakarta. Pada masa itu, daerah Bagelen adalah wilayah *mancanegara* yang menjadi sumber hasil produksi pertanian bagi daerah pusat kekuasaan (*negaragung*). Ketika Perang Jawa berakhir, studi dari Ittihadiyah (2012) mencatat masyarakat Bagelen memasuki tahapan baru dalam perjalanan sejarah kolonial yang dihadapi, yaitu masa Tanam Paksa (1830—1870), berupa perubahan secara struktural maupun kultural, baik secara sosial, politik, ekonomi, budaya, maupun agama. Dalam masa ini, pengaruh agama Kristen yang dibawa oleh kolonial Belanda mulai menguat di masyarakat.

Dalam perkembangannya, pengaruh agama Kristen di wilayah Bagelen cukup kuat. Masyarakat pemeluk agama Kristen di wilayah ini cukup banyak. Hal tersebut relatif berbeda dengan wilayah di luar Bagelen, khususnya di Tanah Jawa, dengan jumlah pemeluk agama Islam yang sangat dominan. Perkembangan Kristen di Purworejo menjadikan wilayah tersebut pusat *zending* atau gereja-gereja Protestan Belanda. Di Kabupaten Purworejo, beberapa desa bahkan telah menjadi pusat pengembangan agama Kristen Kerasulan sejak zaman dulu. Desa yang menjadi pusat perkembangan Kristen misalnya Desa Karangjoso, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo.

Perkembangan agama Kristen di Purworejo juga tidak lepas dari ketokohan Kyai Sadrach sebagai pelopor Gereja Kristen Jawa di wilayah Bagelen. Kyai Sadrach adalah seorang tokoh penginjil. Meskipun seorang misionaris, panggilan Kyai yang umumnya digunakan untuk menyebut tokoh Islam tetap melekat (*Sejarah Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo*, tanpa tahun). Dalam hal ini, mantan santri atau dengan kata lain mantan seorang Muslim, Kyai Sadrach, menjadi muara dari sejarah awal perkembangan Kristen di wilayah tersebut. Konsep santri mungkin dapat diselaraskan dengan pemetaan kultural masyarakat Jawa dalam studi Clifford Geertz (2017) yang dilakukan pada tahun 1955 dengan membagi skema peta budaya Jawa menjadi tiga aliran santri, abangan, dan priyayi. Kyai Sadrach adalah seorang santri yang kemudian masuk Kristen bahkan mengambil posisi sebagai misionaris. Pada 1869, Kyai Sadrach menyiarkan Kristen di Purworejo, bersama-sama tokoh Kristen perempuan, yaitu Nyonya Philips dan Nyonya Oostrom Philips (Carey, 2017).

Ragam perpaduan antara Kristen, tradisionalisme, Islam di daerah Purworejo hingga saat ini masih bertahan. Sebuah ke-eksotikan yang patut menjadi perenungan bersama. Bahkan perpaduan *apik* antara Islam, Kristen dan tradisionalisme di daerah tersebut hingga saat ini masih tampak kuat dalam penyelenggaraan Kirab Bagelen untuk memperingati berdirinya gereja tertua di Kabupaten Purworejo sejak tahun 1900.



## **Representasi Nilai-Nilai Demokratis dalam Kebudayaan Bagelen**

Sejalan dengan keragaman budaya di Indonesia, budaya politik di Indonesia juga bervariasi. Maswadi Rauf (2009) menunjukkan bahwa terdapat budaya politik lokal yang memiliki lebih banyak nilai yang sesuai dengan budaya politik demokratis, namun terdapat budaya politik lokal yang memiliki nilai-nilai budaya demokrasi yang sedikit. Kondisi demikian dapat berdampak pada pelaksanaan demokrasi di daerah. Artinya, proses politik lokal seperti pemilihan kepala daerah langsung (pilkada), ada sebagian daerah yang berhasil melaksanakannya secara demokratis, namun ada daerah lain yang mengalami kendala. Mengacu pada teoretisasi budaya politik dan demokrasi menurut Larry Diamond (1994), budaya politik memang bukan menjadi faktor penentu terhadap keberhasilan demokrasi, namun budaya politik menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi capaian demokrasi. Dalam konteks demikian, tatanan asli masyarakat dapat menjadi faktor yang mempengaruhi, meskipun tidak menentukan pandangan mengenai kekuasaan dan perilaku-perilaku di sekitarnya. Gambaran dari Maswadi Rauf terhadap peta budaya politik di Indonesia menunjukkan pentingnya mempelajari nilai budaya politik lokal dan capaian demokrasi.

Masyarakat dalam budaya Bagelen berbeda dengan budaya Jawa khususnya di pusat kebudayaannya, yang dikenal memiliki nilai-nilai feodalisme. Dalam kehidupan politik modern, gejala feodalisme tampak pada interaksi antara rakyat dan penguasa atau antara bawahan dan atasan, baik pada lembaga birokrasi

tradisional maupun modern di semua tingkatan. Budaya tersebut dianggap sebagai warisan budaya masa lalu, di lingkungan kerajaan seperti Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, yang kemudian juga dipupuk dan dilestarikan oleh kolonial Belanda untuk mempertahankan penjajahan.

Dalam konteks kebudayaan dan praktik politik lokal, wilayah budaya Bagelen dikenal sebagai daerah yang aman tanpa pernah terjadi konflik dalam penyelenggaraan kegiatan politiknya, seperti pemilihan legislatif maupun pemilihan bupati. Hal yang relatif mencolok tampak di wilayah budaya tersebut, terutama pada level masyarakat, adalah kehidupan masyarakat yang damai dan tidak bergejolak. Perpaduan kondisi lokal dari tatanan nilai di wilayah Bagelen dan situasi politik yang damai tidak pernah terjadi kericuhan, mendorong pentingnya mengulas nilai-nilai budaya politik yang mendukung demokrasi di wilayah tersebut. Nilai-nilai yang lebih egaliter dapat berjalan beriringan dengan demokrasi.

Proses politik lokal, yaitu pemilihan kepala daerah di Kabupaten Purworejo, dapat menjadi cerminan bagaimana nilai-nilai budaya lokal ikut berkontribusi bagi tercapainya demokratisasi di tingkat daerah. Nilai-nilai budaya politik dapat dipandang secara fungsional ikut memengaruhi perilaku politik, seperti halnya kontribusi budaya politik terhadap pembentukan demokrasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Pilkada Kabupaten Purworejo telah berlangsung sebanyak tiga kali sejak kekuasaan Orde Baru jatuh.

Pilkada pertama saat era reformasi, yaitu Pilkada Tahun 2000, berlangsung dengan menggunakan mekanisme pemungutan suara oleh DPRD. Pada saat itu, pilkada yang berjalan menampilkan situasi yang unik. Nama calon wakil bupati Kelik Sumrahadi, di-

cantumkan sebagai nama ketiga kandidat bupati yang berlaga. Akhirnya, pasangan Marsaid dan Kelik Sumrahadi berhasil terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Purworejo untuk periode 2000—2005. Kemudian, pada Pilkada Tahun 2005, Kelik Sumrahadi berhasil menjadi bupati Purworejo melalui pilkada langsung untuk pertama kalinya di daerah tersebut. Saat itu, Kelik Sumrahadi berhasil mengalahkan mantan bupati pasangannya, yaitu Marsaid.

Pilkada Tahun 2010 di Kabupaten Purworejo juga berlangsung damai dan tertib. Pada saat itu, mantan wakil bupati pada masa Bupati Kelik Sumarhadi, yaitu Mahzun Zein, berhasil memenangkan pilkada Purworejo (KPUD Purworejo, 2010). Sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat itu, pilkada berlangsung hingga dua putaran karena pada saat putaran pertama berlangsung, belum ada pasangan kandidat yang berhasil mencapai suara mayoritas. Sebagai informasi, Pilkada Purworejo Tahun 2010 diikuti oleh banyak pasangan kandidat, yaitu mencapai 9 (sembilan) pasangan. Adapun pada Pilkada Tahun 2015, pasangan yang memenangkan pilkada adalah pasangan Agus Bastian dan Yuli Hastuti (KPUD Purworejo, 2015). Pada saat itu, pilkada diikuti oleh 3 (tiga) pasangan bupati dan wakil bupati.

Pelaksanaan pilkada di daerah tersebut berlangsung damai dan kondusif. Demikian pula situasinya ketika Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Hingga pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, Purworejo dikenal sebagai wilayah yang kondusif yang menjadi barometer politik Provinsi Jawa Tengah karena terjaga keamanan dan kenyamaannya dalam kontestasi politik lokal yang diselenggarakan (Krijoga, 2018). Merujuk pada Robert Putnam (1971) (dalam Marijan 1999), kehadiran *civic*

*culture* menjadi penentu kinerja pemerintah. Di daerah yang memiliki budaya politik demikian, pemerintah tampak merespon secara efektif tuntutan warganya. Tentu tulisan ini tidak memiliki data yang sampai menjangkau elemen-elemen budaya politik sebagaimana Robert Putnam mengkajinya. Namun demikian, gambaran tentang ketertiban dan kenyamanan proses politik, setidaknya mengindikasikan hadirnya nilai budaya politik, yaitu partisipasi politik yang diiringi kepatuhan dan tanggung jawab.

Selain itu, elaborasi nilai-nilai demokrasi yang tampak dalam kehidupan masyarakat Bagelen, juga mencerminkan nilai-nilai akomodatif, toleransi, dan mau berkompromi dalam kehidupan mereka. Hal tersebut sejalan dengan uraian dari Larry Diamond (1994) mengenai nilai-nilai budaya politik yang bukan faktor penentu demokrasi, namun agar demokrasi substansial dapat tercapai, maka proses politik memerlukan nilai-nilai budaya tersebut. Dalam hal ini, demokrasi memerlukan seperangkat nilai politik dan orientasi dari masyarakat mencakup nilai moderasi, toleransi, peradaban, pemahaman, partisipasi, dan sebagainya.

Gambaran tentang nilai-nilai akomodatif, toleransi, kompromi dapat dilihat pada perpaduan seni budaya lokal dengan tradisi keislaman. Sebagian masyarakatnya masih mengenal praktik-praktik Islam kejawen, yaitu Islam yang masih mengadopsi praktik-praktik tradisi sebelum Islam masuk dan berkembang di tanah Jawa. Kondisi demikian direpresentasikan dengan penggabungan ritual keagamaan dalam wayang kulit, seni *dolalak* di Purworejo diiringi lagu tradisional dan *sholawatan*, seni *jamjaneng*, *angguk*, dan *rebana* yang menggabungkan seni tradisional dan Islam. Masya-

rakat Bagelen hidup dalam lingkungan pertemuan agama-agama besar, namun tetap dapat hidup damai tanpa gejolak.

Mereka memiliki perbedaan dalam hal keagamaan yaitu Islam, Kristen, dan Hindu Budha. Seperti disinggung di atas, beberapa desa di Kabupaten Purworejo menjadi pusat pengembangan agama Kristen Kerasulan sejak zaman dulu. Perkembangan agama Kristen di wilayah tersebut juga tidak lepas dari ketokohan Kyai Sadrach sebagai pelopor Gereja Kristen Jawa di wilayah Bagelen. Adapun perkembangan Islam di wilayah Bagelen terutama lebih menonjol di kawasan pesisir selatan Jawa. Gambaran utuh mengenai perpaduan ketiganya, yaitu adat istiadat, Islam, dan Kristen menjadi gambaran bagaimana sesungguhnya nilai-nilai akomodatif, toleransi dan kompromi yang sangat menunjang demokrasi dimiliki oleh masyarakat Bagelen. Sejalan dengan keegaliterian masyarakat Begelen dibanding dengan nilai-nilai Jawa pusat kekuasaan yang feodalistik, maka budaya Bagelen lebih mengandung nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan ekspresif.

Sementara itu, masyarakat Jawa yang hidup di lingkaran *negaragung* atau pusat kekuasaan (Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta) lebih identik dengan budaya paternalistik yang kurang memberi kebebasan bagi warga masyarakat. Dalam konteks masyarakat yang kuat dalam strata sosial, budaya paternalistik mencerminkan bagaimana elit memiliki peran yang lebih menentukan daripada rakyat kecil, termasuk dalam kehidupan politik. Terlebih dalam kehidupan ekonomi dan pendidikan, sering kali kehidupan kaum elit lebih baik daripada rakyat kecil. Hal tersebut semakin menjadikan antar kelas atas dan kelas bawah ter-segregasi secara kuat. Bila kondisi ini yang terjadi dan dilestari-

kan secara terus-menerus maka demokrasi akan sulit ditegakkan dalam kehidupan politik.

Budaya politik bukanlah faktor penentu dalam demokrasi. Namun demikian, agar proses demokratisasi dapat berjalan, dibutuhkan dukungan dari nilai-nilai budaya lokal. Demokrasi dapat berjalan dengan dukungan seperangkat nilai, kepercayaan, dan sikap terhadap praktik politik yang berjalan. Studi yang dilakukan oleh Siti Zuhro et al. (2009) menunjukkan bahwa budaya politik dan implikasinya pada praktik politik di berbagai daerah di Indonesia juga berbeda-beda. Dalam hal ini, terdapat perubahan dan kesinambungan nilai-nilai budaya politik lokal dan demokrasi lokal yang berlangsung di beberapa wilayah di Indonesia.

Di Jawa Timur yang memiliki budaya egaliteranisme dan ekspresif, nilai-nilai budaya tersebut memberikan pengaruh terhadap ekspresi dan perilaku warga masyarakat. Proses politik berlangsung secara damai dan demokratis. Demikian pula yang terjadi di Sumatra Barat. Masyarakat di daerah tersebut memiliki budaya lokal yang serupa dengan masyarakat Jawa Timur, yaitu cenderung egaliter dan ekspresif. Nilai-nilai toleransi sangat penting untuk membentuk masyarakat demokratis, karena dengan nilai-nilai tersebut, ketidakpercayaan dan konflik dapat diminimalisir. Dengan kata lain, nilai tersebut penting untuk menyeimbangkan konflik dan kebutuhan untuk mencapai konsesus. Adapun di wilayah Sulawesi Selatan, hasil studi Siti Zuhro et al. (2009) menunjukkan bahwa masyarakat masih memegang nilai-nilai patrimonialisme yang cukup kuat. Masih kuatnya budaya patrimonial menjadikan demokrasi di daerah tersebut kurang berkembang pesat. Proses

politik lokal yang terjadi di wilayah tersebut cenderung diwarnai kekerasan yang mengarah pada kekerasan fisik.

Kehidupan masyarakat bawah di Jawa, termasuk di wilayah budaya Bagelen, secara umum juga masih memiliki nilai-nilai musyawarah dan gotong royong. Dalam banyak hal, kedua nilai tersebut masih cukup mengedepan untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Studi dari Mattulada (1986) menunjukkan bahwa musyawarah dan gotong royong sebagai nilai-nilai demokrasi yang masih hidup dalam budaya politik dan telah dipraktikkan lama dalam proses politik di tingkat lokal. Tradisi musyawarah dan mufakat dengan segala bentuk variannya, telah berlangsung sejak berabad-abad yang lalu, pada masa kerajaan hingga sekarang ini, terutama di daerah perdesaan. Oleh karena itu, ada anggapan bahwa bangsa Indonesia sesungguhnya sudah mengenal nilai-nilai budaya berdemokrasi dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kehidupan politik, nilai-nilai budaya yang mendukung demokrasi terkandung dalam kebudayaan lokal. Dalam konteks tulisan ini, adalah nilai-nilai budaya lokal masyarakat Bagelen sebagai wilayah pinggiran dalam kebudayaan Jawa yang dapat mendukung demokrasi. Dengan demikian, mengkaji, merawat dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal untuk mendukung proses politik di tingkat daerah sangat diperlukan untuk mencapai politik Indonesia yang lebih demokratis. Hal yang perlu diingat bahwa budaya politik jauh dari anggapan fenomena yang tidak berubah. Larry Diamond (1994) mencatat bahwa perubahan sosial ekonomi, mobilisasi sosial dan kewargaan, praktik institusional,

pembelajaran politik, dapat mentransformasikan nilai-nilai budaya politik secara bertahap. Untuk itu, merawat dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal menjadi keniscayaan dalam konteks mencapai demokratisasi yang lebih baik.

## **Penutup**

Pada akhirnya, tulisan ini menekankan bahwa nilai-nilai budaya lokal sangat mungkin menunjang tercapainya demokrasi dalam proses politik di tingkat lokal. Nilai-nilai budaya lokal ditunjukkan dalam wilayah budaya Jawa pinggiran yang jauh dari pusat kekuasaan budaya Jawa, yaitu Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Justru dalam masyarakat kecil, yang lebih memiliki nilai-nilai yang lokal yang setara dan bebas, pencapaian demokrasi lebih dimungkinkan. Berbeda dengan pusat kebudayaan Jawa yang memiliki nilai-nilai yang feodal dan paternalistik, nilai-nilai budaya Jawa pinggiran, yaitu Bagelen, lebih mengandung nilai-nilai keegaliteran. Secara lebih spesifik, nilai-nilai budaya lokal yang mendukung demokrasi antara lain kebebasan, kesetaraan, ekspresif, akomodasi, toleransi, dan mau berkompromi, terkandung dalam budaya Bagelen. Selain itu, pada masyarakat perdesaan, seperti umumnya masyarakat Jawa dan Indonesia, nilai-nilai kegotongroyongan dan sikap mau bermusyawarah untuk mencapai kemufakatan juga tampak dalam budaya perdesaan masyarakat Bagelen. Budaya memang bukanlah sesuatu yang statis. Seiring dengan perubahan zaman, nilai-nilai budaya bisa bergeser. Faktor sosial, ekonomi, institusi, dan pengalaman, menjadi bagian yang



menentukan pergeseran tersebut. Untuk itu, menggali terus dan memanfaatkan nilai-nilai budaya lokal dalam berbagai wilayah di Indonesia sangat penting untuk meraih demokrasi substansial yang sesungguhnya dalam kehidupan politik.

## Daftar Pustaka

- Almond, G. dan Verba, S. 2015. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton: Princeton University Press.
- Carey, P. & Vincent, H. 2016. *Perempuan-perempuan Perkasa di Jawa Abad XVIII-XIX*. Jakarta: Gramedia.
- Carey, P. 2017. *Sisi Lain Diponegoro: Babad Kedung Kebo dan Historiografi Perang Jawa*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Crouch, H. 1979. Patrimonialism and Military Rule in Indonesia. *World Politics* (31) 4. 571-587.
- Diamond, L. 1994. *Political Culture and Democracy in Developing Countries*. Boulder London: Lynne Rienner Publishers.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 2008. *Benda Cagar Budaya*. Purworejo.
- Geertz, C. 2017. *Agama Jawa (The Religion of Java)*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Holt, C., Anderson, B., & Siegel, J.T. 1972. *Political Culture in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Hooghe, M. 2013. Budaya Politik. Editor J.T. Ishimaya & M.Breuning. *Ilmu Politik: Dalam Paradigma Abad ke-21( 21<sup>st</sup> Century*

- Political Science: A Reference Handbook*). Kencana Grup. Jakarta. 335-347.
- Ittihadiyah, H. 2012. Bagelen Pasca Perang Jawa (1830-1950): Dinamika Sosial Politik dan Ekonomi di Bekas Wilayah Negaragung Kasultanan Mataram Islam. *Thaqāfiyyāt* (13)2. 223-255.
- Kartodiharjo, S. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- KPUD Purworejo. 2010. <https://kpud-purworejokab.go.id/images/plenopilkada2010>. 1 November 2020.
- KPUD Purworejo. 2015. <https://kpud-purworejokab.go.id/images/pilbuppurworejotahun2015/hasilpleno>. 1 November 2020.
- Krjogja. 2018. Purworejo Hadapi Tahun Politik dengan Kebersamaan. <https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/ke-du/purworejo-hadapi-tahun-politik-dengan-kebersamaan>. 1 November 2020.
- Krjogja. 2019. Begelen, Nama Besar yang Tidak Pernah Mencuat. <https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/ke-du/bagelen-nama-besar-yang-tidak-pernah-mencuat>. 1 Oktober 2020.
- Liddle, W. & Mujani, S. 2000. Islam, Kultur Politik dan Demokratisasi. *Demokrasi dan HAM* (1)1. 132-161.
- Mattulada. 1986. Demokrasi dalam Tradisi Masyarakat Indonesia. Editor A. Rais. *Demokrasi dan Proses Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Marijan, K. 1999. The Study of Political Culture in Indonesia. *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik* (12)2. 57-66.

- Penadi, R. 1988. *Bagelen dan Mataram Kuno*. Purworejo: Lembaga Study dan Pengembangan Sosial dan Budaya.
- Priyadi, S. 2004. *Sejarah dan Kebudayaan Masyarakat Kebumen*. Yogyakarta: Jendela.
- Putnam, R. 1971. Studying Elite Political Culture: The Case of Ideology. *The American Political Science Review* Vol LXV.
- Rauf, M. 2009. Mengungkapkan Hubungan Budaya Politik Lokal dan Demokrasi. Editor S. Zuhro, S. *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesenambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Scott, J. C. 1972. Patron Client, Politics and Political Change in South East Asia. Editor S.W. Schimidt. *Friends, Followers and Factions a Reader in Political Clientalism*. Berkeley: University of California Press.
- Pemerintah Kabupaten Purworejo. Tanpa tahun. *Sejarah Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo*. Pemerintah Kabupaten Purworejo.
- Zuhro, S.R. (ed). 2009. *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesenambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.



Demokrasi, Budaya  
dan Penguatan  
Masyarakat Lokal

Andi Ali Said Akbar - Bowo Sugiarto  
Waluyo Handoko - Sofa Marwah  
Solahuddin Kusumanegara - Triana Ahdiati  
Ahmad Sabieq - Agoeng Noegroho  
Oktafiani Catur Pratiwi - Bambang Kuncoro

Beragamnya arena kontestasi politik dan isu-isu yang digunakan oleh para aktor politik memungkinkan kita untuk melihat bagaimana kekuasaan merasuk ke berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Buku *Demokrasi, Budaya, dan Penguatan Masyarakat Lokal* ini merupakan bunga rampai tulisan para dosen Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) yang mencoba mengulas sejumlah kata kunci yang menjadi perantara untuk memahami bagaimana politik dan kekuasaan bekerja dalam beragam arena dan wajah. Kata kunci tersebut adalah demokrasi, budaya, dan penguatan masyarakat lokal.

Meskipun ketiga kata kunci itu bisa dilihat berdiri sendiri, namun—melalui buku ini—pembaca akan diajak untuk menemukan benang merah dari beragamnya arena kontestasi politik dan isu-isu yang digunakan oleh para aktor politik. Sebagai pelengkap, disinggung pula saran terkait metode penelitian yang bisa digunakan untuk menindaklanjuti tulisan-tulisan yang termuat dalam buku ini.

 RELASI  
INTI MEDIA

ISBN (13) 978-602-0787-67-1



9 786020 787671